



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025
Reviewed : 16/06/2025
Accepted : 20/06/2025
Published : 27/06/2025

Ryan Irlawan¹
 Vicky Hidayat²
 Rudiana³

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI TERAS GUNUNG GEULIS DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN DESA

Abstrak

Permasalahan ketimpangan ekonomi desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah mendorong munculnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan lokal. Penelitian ini berfokus pada BUMDes Teras Gunung Geulis yang berada di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Jatinangor, yang memiliki potensi besar dalam sektor ekowisata, kuliner lokal, dan ekonomi kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa serta mendorong kemandirian desa secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat dari Edi Suharto (2005), yang meliputi akses terhadap sumber daya produktif, partisipasi dalam pengambilan keputusan, penguatan kapasitas, serta transformasi struktur sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Teras Gunung Geulis berperan penting dalam membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha, serta memperkuat kapasitas warga melalui pelatihan dan pendampingan. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan dalam strategi pemasaran digital, serta hambatan akses pasar yang lebih luas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes telah menjadi katalisator dalam pemberdayaan masyarakat desa, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi strategis. Pelatihan manajerial, perluasan jejaring digital, dan kemitraan lintas sektor direkomendasikan untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak BUMDes dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Desa, Teras Gunung Geulis, Kemandirian Desa

Abstract

This article examines the implementation of New Public Management (NPM) principles in the financial management system of Jatiroke Village, Sumedang Regency, Indonesia. The study is driven by the need to strengthen Village Original Revenue (PADes) through Village-Owned Enterprises (BUMDes), which have not been optimally managed in terms of efficiency, accountability, and performance orientation. Using a qualitative descriptive approach and a case study method, this research analyzes five core principles of NPM—decentralization, privatization, downsizing, debureaucratization, and managerialism—and how they are applied in the village financial system, particularly through the budgeting and operation of BUMDes. Data were collected through structured interviews with village officials and BUMDes managers, as well as document analysis of financial reports and planning instruments such as the APBDes. The findings indicate that while the formal structure of Jatiroke's financial governance reflects NPM ideals, its substantive implementation remains constrained by limited human resources, lack of performance-based evaluation, and minimal public participation. The study concludes that NPM principles in Jatiroke Village are still adopted at a structural level, requiring further

^{1,2,3}Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
 email: ryan23009@mail.unpad.ac.id, vicky23001@mail.unpad.ac.id, rudiana@unpad.ac.id

development in managerial professionalism and citizen engagement. It recommends strengthening digital-based transparency, improving entrepreneurship-oriented training for BUMDes staff, and applying performance-based evaluations for village economic units.

Keywords: BUMDes, Community Empowerment, Rural Economy, Teras Gunung Geulis, Village Self-Reliance

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan pondasi penting dalam upaya memperkuat struktur sosial, ekonomi, dan politik di tingkat akar rumput. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas wilayah perdesaan, pembangunan desa bukan hanya menjadi agenda sektoral, tetapi juga agenda strategis nasional yang berperan dalam menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan pengakuan penuh atas otonomi desa untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Hal ini membuka peluang besar bagi desa untuk membangun dari bawah, berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Salah satu inovasi kebijakan yang muncul dari implementasi UU Desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan dikelola secara mandiri dan partisipatif untuk mengelola potensi ekonomi lokal. BUMDes diharapkan mampu menjawab tantangan klasik pembangunan desa seperti ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Lebih jauh, BUMDes juga diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, yakni menguatkan posisi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui peningkatan partisipasi, keterampilan, dan kemandirian.

Dalam kerangka ini, BUMDes tidak hanya dilihat sebagai unit bisnis yang mengejar profit, tetapi juga sebagai wadah pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes akan sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi lokal, serta membangun kelembagaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana BUMDes mampu berfungsi tidak hanya sebagai mesin ekonomi desa, tetapi juga sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat secara luas.

Desa Gunung Geulis, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu contoh desa yang telah menginisiasi BUMDes dengan nama Teras Gunung Geulis. Desa ini memiliki kekayaan sumber daya alam berupa perbukitan dan kawasan wisata yang potensial dikembangkan. BUMDes Teras Gunung Geulis memanfaatkan potensi tersebut dengan mengembangkan unit usaha seperti wisata alam, kuliner lokal, homestay, serta pengolahan produk kreatif desa. Usaha-usaha ini tidak hanya bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif dan penguatan kapasitas warga. Namun demikian, meskipun memiliki potensi besar, BUMDes Teras Gunung Geulis menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial, minimnya akses terhadap pasar yang lebih luas, dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi BUMDes sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan pencapaian aktual yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu:

- Bagaimana potensi BUMDes Teras Gunung Geulis dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi desa?
- Bagaimana kontribusi BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat desa?
- Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan oleh BUMDes?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BUMDes Teras Gunung Geulis dalam proses pemberdayaan masyarakat desa serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitasnya. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis berbasis teori pemberdayaan masyarakat dari Edi Suharto (2005), penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi pemberdayaan berbasis ekonomi lokal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep kunci dalam pembangunan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki kontrol atas perubahan sosial dan ekonomi di lingkungannya. Dalam literatur pembangunan, pemberdayaan sering dipandang sebagai cara untuk mengatasi keterbelakangan, ketimpangan, dan ketergantungan struktural yang selama ini menghambat kemajuan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Menurut Edi Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mereka mampu mengakses dan mengelola sumber daya secara mandiri, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Pemberdayaan bukan sekadar bantuan ekonomi atau program karitatif, melainkan transformasi struktural yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik kendali atas kehidupannya.

Edi Suharto mengidentifikasi empat dimensi utama dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Akses terhadap sumber daya produktif, seperti modal, teknologi, informasi, lahan, dan jejaring sosial. Tanpa akses yang adil terhadap sumber daya, masyarakat akan tetap berada dalam posisi marginal dan bergantung.
2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Partisipasi ini penting untuk membangun rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.
3. Penguatan kapasitas individu dan kelompok, termasuk pelatihan keterampilan, pendampingan teknis, peningkatan literasi ekonomi dan digital, serta pengembangan kepercayaan diri dan kemandirian warga.
4. Transformasi struktur sosial-ekonomi lokal, yang diarahkan pada penciptaan sistem sosial yang lebih inklusif, adil, dan mendukung distribusi sumber daya secara merata, bukan hanya terkonsentrasi pada elite desa atau kelompok dominan.

Pendekatan pemberdayaan yang dikembangkan oleh Suharto menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam konteks desa, pemberdayaan bukan hanya bermakna peningkatan pendapatan warga, tetapi juga penguatan posisi tawar masyarakat dalam proses politik lokal, peningkatan solidaritas sosial, dan kemampuan kolektif dalam mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan juga memiliki indikator keberhasilan, seperti meningkatnya jumlah masyarakat yang berwirausaha, keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif, adanya mekanisme musyawarah desa yang terbuka dan inklusif, serta terbangunnya jejaring ekonomi antar warga. Oleh karena itu, teori pemberdayaan masyarakat menjadi kerangka penting dalam memahami sejauh mana BUMDes dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak transformasi ekonomi dan sosial di desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inovasi kelembagaan yang lahir dari semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan kemandirian dan penguatan ekonomi berbasis lokal. BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh desa dan dikelola secara kolektif untuk mengelola potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya alam yang ada di wilayah desa tersebut. Dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes diharapkan menjadi pilar utama dalam pengelolaan usaha desa yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

BUMDes memiliki dua dimensi peran penting:

1. Sebagai entitas ekonomi yang mengelola berbagai unit usaha produktif desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, dan merangsang aktivitas ekonomi lokal.
2. Sebagai wahana sosial untuk memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan usaha, pelatihan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan bersama.

Secara konseptual, keberadaan BUMDes ditujukan untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah, sekaligus memperkuat posisi tawar desa dalam menghadapi pasar. Menurut Adhibah, A., Alam, U. M., & Munandar, M. A. (2022) desa dapat memanfaatkan potensi lokal secara optimal, seperti sumber daya alam, wisata, pertanian, atau hasil kerajinan. BUMDes juga diharapkan menjadi inkubator bagi UMKM lokal dan tempat belajar kewirausahaan bagi warga desa. Lebih dari itu, BUMDes juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, dengan cara:

- Menyediakan akses permodalan dan pelatihan bagi pelaku usaha desa
- Membuka ruang partisipasi warga dalam pengelolaan usaha dan perencanaan strategis
- Menjembatani kerja sama antara desa dengan mitra eksternal seperti swasta, pemerintah daerah, dan lembaga donor
- Mengembangkan sistem ekonomi lokal yang berbasis nilai gotong royong dan kepemilikan kolektif

Namun dalam implementasinya, banyak BUMDes menghadapi tantangan seperti lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, konflik internal antar aktor, serta kendala pemasaran dan akses pasar digital. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan melalui BUMDes perlu disertai dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajerial, serta pengembangan strategi kolaboratif yang melibatkan aktor-aktor di luar desa. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga instrumen penting dalam membangun desa berdaya, yaitu desa yang mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan memiliki kapasitas sosial-ekonomi yang tangguh di tengah perubahan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teras Gunung Geulis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta membangun kemandirian ekonomi desa. Pendekatan ini sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara naturalistik, dimana peneliti berupaya memahami realitas sosial dari perspektif aktor-aktor lokal yang terlibat secara langsung dalam kegiatan BUMDes. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017), pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi kontekstual terhadap dinamika sosial tanpa adanya intervensi dari luar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Edi Suharto (2005) sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip seperti akses terhadap sumber daya produktif, partisipasi dalam pengambilan keputusan, penguatan kapasitas individu dan kelompok, serta transformasi struktur sosial-ekonomi telah diimplementasikan dalam praktik BUMDes di Desa Gunung Geulis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi antara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti pengelola BUMDes, kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi desa. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar mampu menggali narasi yang bersifat terbuka dan reflektif, memungkinkan informan menyampaikan pengalaman serta persepsinya secara bebas namun tetap dalam kerangka isu yang diteliti. Di sisi lain, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen penting seperti profil BUMDes, laporan keuangan, notulensi musyawarah desa, regulasi terkait BUMDes, serta dokumen perencanaan desa. Teknik ini memberikan data faktual yang dapat dibandingkan dengan data hasil wawancara guna meningkatkan keandalan analisis.

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2016: 85). Kriteria pemilihan mencakup individu yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes, memiliki pemahaman mengenai konsep pemberdayaan masyarakat, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka dan transparan. Teknik ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman data dibanding kuantitas responden. Untuk menjamin validitas dan keandalan data, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data dari wawancara dengan data dokumentasi dan observasi lapangan. Triangulasi dilakukan

untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencerminkan realitas secara utuh dan akurat (Miles & Huberman, 1994).

Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari hasil wawancara dan dokumen untuk memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dimensi pemberdayaan menurut Edi Suharto. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan keterlibatan masyarakat, penguatan kapasitas, akses ekonomi, dan bentuk partisipasi dalam kegiatan BUMDes. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan berkelanjutan, di mana peneliti mengidentifikasi pola-pola temuan dan memverifikasinya secara teoritis maupun empiris. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan kegiatan pengumpulan data utama dilakukan langsung di lokasi unit usaha dan Kantor Desa Jatiroke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat BUMDes Teras Gunung Geulis

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teras Gunung Geulis merupakan lembaga ekonomi desa yang berdiri sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes ini dibentuk sebagai inisiatif Pemerintah Desa Gunung Geulis bersama warga, dengan tujuan utama untuk mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memberdayakan masyarakat setempat. Secara kelembagaan, BUMDes Teras Gunung Geulis telah memiliki struktur organisasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kepala unit usaha, bendahara, hingga kelompok kerja komunitas.

BUMDes ini memiliki fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan potensi lokal lainnya. Unit usaha utama yang dikelola meliputi ekowisata perbukitan dan pengembangan kuliner khas desa. Sejak berdiri, BUMDes ini berupaya mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pengelolaan lingkungan secara lestari. Selain itu, pelibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha menjadi ciri khas dari pola operasional BUMDes ini, mencerminkan prinsip-prinsip pemberdayaan seperti partisipasi dan kontrol komunitas.

Namun pada wawancara dengan Bendahara Desa Jatiroke (15 Mei 2025), mengatakan BUMDes pada Teras Gunung Geulis ini masih tergolong dalam fase pengembangan, di mana upaya peningkatan kapasitas pengelola dan kelembagaan menjadi tantangan yang tengah dihadapi serta kurangnya inovasi dan kehadiran masyarakat untuk memberikan inovasi atau masukan terhadap Teras Gunung Geulis ini. Kehadiran BUMDes ini juga mencerminkan pembangunan desa dari pendekatan birokratis ke arah kolaboratif dan berbasis masyarakat. Dalam hal ini, BUMDes tidak hanya diposisikan sebagai alat produksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang belajar sosial, tempat warga mengembangkan keterampilan manajerial, kepemimpinan komunitas, dan kewirausahaan desa. Dukungan regulasi dari Pemerintah Desa Gunung Geulis, serta keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan kegiatan usaha, menjadi faktor penting yang menunjang keberlangsungan dan legitimasi BUMDes di tengah masyarakat.

B. Potensi Ekonomi Desa

Desa Jatiroke, yang terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama dalam sektor pertanian lahan kering, jasa lokal, dan aksesibilitas terhadap kawasan pendidikan dan perkotaan. Lokasinya yang berdekatan dengan kampus Universitas Padjadjaran, kawasan perumahan, dan jalur lalu lintas utama menjadikan desa ini memiliki nilai strategis secara ekonomi. Potensi ini mulai dikembangkan melalui BUMDes sebagai lembaga yang mengelola aset dan kegiatan ekonomi desa secara kolektif. Namun pada wawancara dengan perangkat desa (15 Mei 2025) masih kurang nya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan atau memberi inovasi pada BUMDes ini, Pemerintah Desa Jatiroke telah mendorong penguatan BUMDes untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi produktif, mulai dari pengelolaan kios desa, pengelolaan tempat usaha strategis, hingga jasa pendukung lainnya.

Sektor pertanian, meskipun tidak dominan secara luas lahan, tetap menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi warga. Produk-produk lokal seperti hasil kebun, serta ternak

kecil memiliki potensi untuk dikembangkan dalam skema ekonomi lokal yang terintegrasi. Dalam beberapa inisiatif, BUMDes telah menjajaki kerjasama dengan kelompok tani dan pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui pengemasan, pemasaran digital, serta penciptaan merek lokal desa. Potensi lainnya muncul dari kehadiran kawasan hunian padat yang memungkinkan pengembangan jasa sewa, logistik lokal, hingga usaha mikro berbasis rumah tangga.

Dengan latar tersebut, pengelolaan potensi ekonomi desa membutuhkan strategi yang menggabungkan kekuatan modal sosial masyarakat, keterampilan manajerial, serta dukungan kebijakan desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak transformasi ini dengan tetap memegang prinsip pemberdayaan seperti keterlibatan warga, peningkatan kapasitas ekonomi, dan pengembangan jejaring usaha. Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005), langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatiroke dan pengelola BUMDes menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi serta ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat desa.

C. Praktik Pemberdayaan melalui BUMDes

BUMDes Teras Gunung Geulis hadir sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara produktif dan inklusif. Sejak awal pendiriannya, BUMDes ini dirancang tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial yang melibatkan warga desa dalam setiap aspek kegiatan usaha. Praktik pemberdayaan terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam identifikasi potensi desa hingga pelaksanaan kegiatan usaha seperti pengelolaan wisata alam dan pengembangan kuliner lokal.

Akses masyarakat terhadap peluang ekonomi merupakan manifestasi nyata dari prinsip pemberdayaan. BUMDes memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja di unit usaha seperti pengelola homestay, warung kopi, hingga pemandu wisata. Selain itu, warga juga dapat menjadi mitra usaha dengan menyediakan produk lokal seperti hasil kebun, olahan makanan, dan jasa transportasi wisata. Ketersediaan akses terhadap sumber daya produktif ini menunjukkan bahwa BUMDes telah menjalankan salah satu dimensi utama pemberdayaan sebagaimana dikemukakan Suharto (2005).

Praktik pemberdayaan juga tampak melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan musyawarah desa rutin dijadikan sebagai forum konsultasi dan transparansi, terutama dalam penentuan arah usaha dan pembagian keuntungan BUMDes. Dalam forum ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kritik, saran, maupun inisiatif baru, sehingga memperkuat legitimasi kelembagaan BUMDes sebagai milik bersama. Prinsip partisipasi ini penting untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif atas hasil pembangunan desa. Penguatan kapasitas individu dan kelompok juga menjadi fokus utama dalam praktik pemberdayaan BUMDes Teras Gunung Geulis. Berbagai pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, serta pelatihan penggunaan media digital telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan warga. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng mitra akademik dari perguruan tinggi serta lembaga pelatihan swasta. Masyarakat tidak hanya dibekali dengan teori, tetapi juga praktik langsung dalam mengelola unit usaha dan menghadapi tantangan pemasaran modern.

Pendampingan teknis secara berkala juga menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Pendamping desa dan pengelola BUMDes rutin melakukan evaluasi dan mentoring terhadap unit-unit usaha yang dikelola masyarakat. Pendampingan ini tidak hanya memperbaiki aspek manajerial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk berinovasi dan mengambil peran lebih besar dalam kegiatan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan gagasan Suharto (2005), bahwa pemberdayaan sejati mengarah pada transformasi kesadaran dan kemandirian. Dampak dari praktik pemberdayaan melalui BUMDes Teras Gunung Geulis mulai terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meskipun belum merata. Beberapa kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan usaha BUMDes melaporkan peningkatan penghasilan dan kemandirian ekonomi rumah tangga. Selain itu, terjadi pula perubahan struktur sosial desa, di mana masyarakat lebih terbuka terhadap kerja sama, gotong royong, dan pengambilan keputusan berbasis kolektif.

BUMDes juga mulai berperan sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan. Melalui integrasi kegiatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, BUMDes Teras Gunung Geulis

mempromosikan konsep ekowisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat. Kegiatan ini memberikan nilai tambah bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan sosial desa sebagai kawasan yang berdaya dan mandiri. Dengan demikian, praktik pemberdayaan melalui BUMDes Teras Gunung Geulis telah mencerminkan kerangka pemberdayaan yang dikembangkan Suharto (2005), baik dari sisi akses, partisipasi, kapasitas, maupun transformasi sosial. Keberhasilan ini tentu perlu diperkuat melalui sistem kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

D. Tantangan dan Hambatan

Meskipun BUMDes Teras Gunung Geulis telah menunjukkan upaya progresif dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi fungsi lembaga ini. Tantangan-tantangan tersebut muncul tidak hanya dari dalam kelembagaan BUMDes itu sendiri, tetapi juga dari lingkungan sosial, budaya, serta kebijakan yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi pengelola BUMDes maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha. Sebagian besar pengelola belum memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang manajemen usaha atau kewirausahaan, sehingga sulit dalam menyusun perencanaan bisnis, mengelola keuangan secara efisien, hingga melakukan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Akibatnya, meskipun potensi usaha sudah teridentifikasi, pelaksanaan dan pengelolaannya masih bersifat konvensional dan reaktif terhadap perubahan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang belum menyeluruh. Dalam praktiknya, hanya sebagian kecil warga desa yang aktif terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan unit usaha BUMDes, sedangkan sebagian lainnya masih bersikap pasif. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kurangnya informasi dan edukasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam BUMDes, serta masih adanya persepsi bahwa BUMDes adalah lembaga milik desa secara administratif, bukan milik warga secara kolektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan Edi Suharto (2005), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jika masyarakat tidak merasa memiliki, maka rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan BUMDes pun menjadi rendah.

Selain masalah partisipasi, persoalan akses terhadap teknologi dan pemasaran juga menjadi hambatan serius. Di tengah arus digitalisasi ekonomi yang semakin cepat, banyak produk desa tidak mampu bersaing karena keterbatasan dalam hal promosi, branding, dan distribusi digital. Pengelola BUMDes Teras Gunung Geulis memang telah mengikuti beberapa pelatihan digital marketing, namun implementasinya masih belum optimal. Kesulitan dalam penggunaan perangkat digital, keterbatasan jaringan internet, serta kurangnya konsistensi dalam memanfaatkan media sosial dan marketplace menjadi kendala utama. Padahal, untuk menarik pasar wisatawan dan konsumen luar daerah, strategi digital sangat penting dalam membangun citra produk dan menjangkau konsumen secara luas. Tanpa transformasi digital yang serius, BUMDes akan terus tertinggal dalam kompetisi pasar terbuka.

Keterbatasan akses permodalan juga menjadi hambatan utama dalam mengembangkan unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes. Sebagian besar modal awal diperoleh dari dana desa, yang jumlahnya terbatas dan penggunaannya harus melalui mekanisme birokratis yang ketat. Sementara itu, akses ke lembaga keuangan seperti perbankan atau koperasi belum banyak dimanfaatkan karena keterbatasan kapasitas manajerial dan jaminan aset. Rendahnya literasi keuangan juga menjadi penyebab enggannya pengelola BUMDes untuk mengajukan pinjaman atau menjalin kemitraan keuangan yang lebih luas. Akibatnya, kegiatan usaha cenderung berskala kecil dan tidak bisa berkembang secara signifikan. Hambatan ini juga memperkecil peluang diversifikasi usaha dan inovasi layanan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjawab dinamika pasar yang cepat berubah.

Di sisi kelembagaan, BUMDes Teras Gunung Geulis masih menghadapi persoalan dalam hal struktur organisasi dan sistem kerja yang belum profesional. Beberapa jabatan kunci dalam organisasi BUMDes diisi oleh individu yang merangkap jabatan lain di pemerintah desa, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fokus kerja. Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang rutin membuat BUMDes sulit mengukur efektivitas kegiatan dan capaian usaha secara objektif. Ketiadaan indikator keberhasilan yang terukur dan sistem pelaporan yang transparan juga berpotensi menimbulkan distrust dari

masyarakat. Padahal, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola kelembagaan pemberdayaan (Adhibah et al., 2022), yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ekonomi desa.

Masalah regulasi dan birokrasi turut menjadi penghambat dalam fleksibilitas operasional BUMDes. Dalam banyak kasus, pengelola menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk pengadaan barang, pencairan dana, hingga pelaporan keuangan. Kompleksitas prosedur yang harus dilewati seringkali menyita waktu dan energi pengelola, sehingga mengganggu fokus mereka dalam mengembangkan inovasi usaha. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pusat seringkali bersifat seragam dan tidak memperhitungkan karakteristik lokal masing-masing desa. Akibatnya, BUMDes kesulitan menyesuaikan regulasi dengan realitas lokal yang dihadapi, termasuk dalam hal prioritas pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi desa.

Tidak kalah penting, tantangan budaya juga menjadi faktor yang menghambat proses pemberdayaan melalui BUMDes. Masih banyak masyarakat desa yang memiliki pola pikir dependensi atau ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Alih-alih melihat BUMDes sebagai peluang untuk mandiri secara ekonomi, mereka menganggap keberadaan BUMDes sebagai program pemerintah yang tidak memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Perubahan pola pikir ini memerlukan proses edukasi yang terus-menerus dan berkelanjutan, serta didukung oleh contoh praktik baik (best practice) yang dapat ditiru oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan yang dihadapi BUMDes Teras Gunung Geulis menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan atau bebas hambatan. Pemberdayaan memerlukan dukungan sistemik, mulai dari kebijakan yang berpihak, kelembagaan yang kuat, hingga perubahan budaya masyarakat yang lebih partisipatif dan mandiri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan melalui BUMDes harus dilakukan secara terintegrasi, melibatkan kolaborasi lintas sektor, dan berlandaskan pada prinsip inklusivitas, transparansi, serta keadilan sosial. Strategi penguatan kelembagaan dan manajerial harus diprioritaskan, diiringi oleh perluasan akses pasar dan digitalisasi, agar BUMDes benar-benar dapat memainkan perannya sebagai motor penggerak transformasi ekonomi dan sosial di tingkat desa.

E. Analisis Teoritis

Meskipun BUMDes Teras Gunung Geulis telah menunjukkan upaya progresif dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi fungsi lembaga ini. Tantangan-tantangan tersebut muncul tidak hanya dari dalam kelembagaan BUMDes itu sendiri, tetapi juga dari lingkungan sosial, budaya, serta kebijakan yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi pengelola BUMDes maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha. Sebagian besar pengelola belum memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang manajemen usaha atau kewirausahaan, sehingga sulit dalam menyusun perencanaan bisnis, mengelola keuangan secara efisien, hingga melakukan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Akibatnya, meskipun potensi usaha sudah teridentifikasi, pelaksanaan dan pengelolaannya masih bersifat konvensional dan reaktif terhadap perubahan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang belum menyeluruh. Dalam praktiknya, hanya sebagian kecil warga desa yang aktif terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan unit usaha BUMDes, sedangkan sebagian lainnya masih bersikap pasif. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kurangnya informasi dan edukasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam BUMDes, serta masih adanya persepsi bahwa BUMDes adalah lembaga milik desa secara administratif, bukan milik warga secara kolektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan Edi Suharto (2005), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jika masyarakat tidak merasa memiliki, maka rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan BUMDes pun menjadi rendah.

Selain masalah partisipasi, persoalan akses terhadap teknologi dan pemasaran juga menjadi hambatan serius. Di tengah arus digitalisasi ekonomi yang semakin cepat, banyak produk desa tidak mampu bersaing karena keterbatasan dalam hal promosi, branding, dan

distribusi digital. Pengelola BUMDes Teras Gunung Geulis memang telah mengikuti beberapa pelatihan digital marketing, namun implementasinya masih belum optimal. Kesulitan dalam penggunaan perangkat digital, keterbatasan jaringan internet, serta kurangnya konsistensi dalam memanfaatkan media sosial dan marketplace menjadi kendala utama. Padahal, untuk menarik pasar wisatawan dan konsumen luar daerah, strategi digital sangat penting dalam membangun citra produk dan menjangkau konsumen secara luas. Tanpa transformasi digital yang serius, BUMDes akan terus tertinggal dalam kompetisi pasar terbuka.

Keterbatasan akses permodalan juga menjadi hambatan utama dalam mengembangkan unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes. Sebagian besar modal awal diperoleh dari dana desa, yang jumlahnya terbatas dan penggunaannya harus melalui mekanisme birokrasi yang ketat. Sementara itu, akses ke lembaga keuangan seperti perbankan atau koperasi belum banyak dimanfaatkan karena keterbatasan kapasitas manajerial dan jaminan aset. Rendahnya literasi keuangan juga menjadi penyebab enggannya pengelola BUMDes untuk mengajukan pinjaman atau menjalin kemitraan keuangan yang lebih luas. Akibatnya, kegiatan usaha cenderung berskala kecil dan tidak bisa berkembang secara signifikan. Hambatan ini juga memperkecil peluang diversifikasi usaha dan inovasi layanan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjawab dinamika pasar yang cepat berubah.

Di sisi kelembagaan, BUMDes Teras Gunung Geulis masih menghadapi persoalan dalam hal struktur organisasi dan sistem kerja yang belum profesional. Beberapa jabatan kunci dalam organisasi BUMDes diisi oleh individu yang merangkap jabatan lain di pemerintah desa, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fokus kerja. Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang rutin membuat BUMDes sulit mengukur efektivitas kegiatan dan capaian usaha secara objektif. Ketiadaan indikator keberhasilan yang terukur dan sistem pelaporan yang transparan juga berpotensi menimbulkan distrust dari masyarakat. Padahal, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola kelembagaan pemberdayaan (Adhibah et al., 2022), yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ekonomi desa.

Masalah regulasi dan birokrasi turut menjadi penghambat dalam fleksibilitas operasional BUMDes. Dalam banyak kasus, pengelola menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk pengadaan barang, pencairan dana, hingga pelaporan keuangan. Kompleksitas prosedur yang harus dilewati seringkali menyita waktu dan energi pengelola, sehingga mengganggu fokus mereka dalam mengembangkan inovasi usaha. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pusat seringkali bersifat seragam dan tidak memperhitungkan karakteristik lokal masing-masing desa. Akibatnya, BUMDes kesulitan menyesuaikan regulasi dengan realitas lokal yang dihadapi, termasuk dalam hal prioritas pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi desa.

Tidak kalah penting, tantangan budaya juga menjadi faktor yang menghambat proses pemberdayaan melalui BUMDes. Masih banyak masyarakat desa yang memiliki pola pikir dependensi atau ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Alih-alih melihat BUMDes sebagai peluang untuk mandiri secara ekonomi, mereka menganggap keberadaan BUMDes sebagai program pemerintah yang tidak memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Perubahan pola pikir ini memerlukan proses edukasi yang terus-menerus dan berkelanjutan, serta didukung oleh contoh praktik baik (best practice) yang dapat ditiru oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan yang dihadapi BUMDes Teras Gunung Geulis menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan atau bebas hambatan. Pemberdayaan memerlukan dukungan sistemik, mulai dari kebijakan yang berpihak, kelembagaan yang kuat, hingga perubahan budaya masyarakat yang lebih partisipatif dan mandiri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan melalui BUMDes harus dilakukan secara terintegrasi, melibatkan kolaborasi lintas sektor, dan berlandaskan pada prinsip inklusivitas, transparansi, serta keadilan sosial. Strategi penguatan kelembagaan dan manajerial harus diprioritaskan, diiringi oleh perluasan akses pasar dan digitalisasi, agar BUMDes benar-benar dapat memainkan perannya sebagai motor penggerak transformasi ekonomi dan sosial di tingkat desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Teras Gunung Geulis merupakan salah satu inisiatif kelembagaan ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan, BUMDes berfungsi tidak hanya sebagai entitas ekonomi yang mengejar profit, tetapi juga sebagai ruang kolektif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri dan produktif. Keberadaan unit usaha berbasis potensi lokal seperti ekowisata, kuliner khas desa, dan pengelolaan homestay menjadi titik awal terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang berbasis komunitas.

Dari aspek teori pemberdayaan Edi Suharto (2005), BUMDes Teras Gunung Geulis telah mulai mengimplementasikan empat dimensi utama pemberdayaan, yaitu: (1) akses terhadap sumber daya produktif yang tampak dari terbukanya peluang kerja dan usaha bagi masyarakat; (2) partisipasi dalam pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam forum musyawarah desa dan pelibatan warga dalam pengelolaan usaha; (3) penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan warga; serta (4) transformasi struktur sosial-ekonomi desa yang secara bertahap membentuk pola relasi baru yang lebih inklusif dan kolaboratif. Meskipun masih pada tahap awal, proses ini menunjukkan arah yang positif dalam upaya membangun desa yang berdaya dan mandiri.

Namun demikian, implementasi di lapangan juga memperlihatkan sejumlah hambatan yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam hal manajerial dan kewirausahaan, rendahnya literasi digital dan akses pemasaran daring, lemahnya jejaring usaha, serta keterbatasan dalam hal permodalan dan akses pasar luar desa. Selain itu, tantangan kelembagaan seperti tumpang tindih peran, struktur organisasi yang belum profesional, serta minimnya sistem evaluasi dan pelaporan juga menghambat efektivitas operasional BUMDes. Partisipasi masyarakat juga belum menyentuh seluruh lapisan secara merata. Kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin masih belum terlibat secara aktif dalam proses perencanaan maupun operasional BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi partisipasi belum sepenuhnya bersifat substantif dan inklusif. Selain itu, masih terdapat tantangan budaya berupa pola pikir masyarakat yang cenderung pasif dan bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pemberdayaan sejati belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sehari-hari warga desa.

Temuan ini menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu bahwa potensi BUMDes Teras Gunung Geulis cukup besar dalam mengembangkan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, namun realisasi potensinya masih terganjal oleh berbagai kendala internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penguatan kapasitas yang terstruktur, dukungan kelembagaan yang konsisten, serta pelibatan semua elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Secara umum, BUMDes Teras Gunung Geulis telah menunjukkan peran sebagai katalisator dalam proses pembangunan berbasis komunitas. Meskipun belum sempurna, keberadaannya memberi arah baru dalam pola pembangunan desa yang lebih partisipatif, berorientasi pada kemandirian, dan mengutamakan potensi lokal sebagai basis kekuatan ekonomi. Jika tantangan-tantangan utama dapat diatasi, maka BUMDes ini berpotensi besar menjadi model praktik baik (*best practice*) bagi pemberdayaan masyarakat desa di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Wawancara dengan Sekretaris dan Bendahara Desa Jatiroke, Mei 2025.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Adhibah, A., Alam, U. M., & Munandar, M. A. (2022). Peran Institusi Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Pengelolaan BUMDes di Pujonkidul, Kabupaten Malang. *Sosial & Politik*, 8(1), 96–108
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.
- APBDes Desa Jatiroke Tahun Anggaran 2025. (Dokumen internal Desa Jatiroke).
- Laporan Kegiatan dan Keuangan BUMDes Teras Gunung Geulis.
- Notulensi Musyawarah Desa dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Gunung Geulis. (Dokumen internal desa, 2025).